

KRISIS EKONOMI, DISPARITAS, DAN PENANAMAN MODAL ASING

Yeru Salimianto ¹

Anthoni Sriyatno ²

¹ BKPM Propinsi Jawa Tengah

² Alumni Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta

ABSTRACT

By using Data Panel Model can be found the interprovincial disparity in Indonesia since 1997 until 1999, which caused by foreign investment. While the domestic investment, significantly do not influence to disparity. The disparity measured by Index Williamson was not big but that way remain to have to be made attention. Java and specially Capital Special District give a very big contribution to interprovincial disparity. As monetary and economic crisis precisely causes the disparity, become smaller. The weakness of this Data Panel Model there are low coefficient value of determination (R²) that is 26,3%. Other weaknesses lay in assumption that an equation slope of dummy variable is constant.

Keywords: Disparity, PMA, PMDN, Data Panel

PENDAHULUAN

Disparitas (kesenjangan) memiliki dua wajah yang saling bertolak belakang satu dengan yang lain. Wajah pertama adalah wajah yang mudah terlihat di tengah masyarakat, yaitu wajah buruk disparitas. Sedikit orang yang berlimpah harta benda dibandingkan banyak orang yang kekurangan harta merupakan gambaran sosio-ekonomi disparitas yang mudah terlihat. Adapun wajah kedua, adalah wajah bagian pertama dari kesinambungan pembangunan. Wiliamson, sebagaimana dikemukakan oleh Akita dan Lukman (1995), menganggap bahwa pada tahap awal pembangunan disparitas meningkat, selanjutnya, semakin maju pembangunan ekonomi, disparitas mengalami peningkatan yang melemah dan akhirnya menurun. Mengutip Williamson, dan menambahkan berbagai penelitian yang pernah dilakukan Akita dan Lukman mengemukakan sebagai berikut:

In the early stages of economic development, regional income inequality will increase, largely because of the disequilibrating effects of factor mobility. This will be followed by a period of stability, characterised by relatively high level of inequality between regions. Finally, a lessening of regional income inequality will set in as the national economy matures and equilibrating forces take effect. This overall process, if plotted against national economic development, will result in a bell-shaped or inverted U-shaped curve

Dalam wajah kedua ini, seolah-olah dikemukakan bahwa disparitas merupakan biaya sosial atau bahkan takdir dari keberhasilan pembangunan di masa mendatang. Dengan demikian terlihat bahwa terdapat dua wajah disparitas yang bertentangan, yang pertama disparitas adalah wajah keburukan, sedangkan kedua adalah wajah (pra)kebaikan.

Krisis ekonomi dan moneter yang melanda Indonesia sejak pertengahan 1997 diperkirakan merupakan ajang yang tepat untuk mengamati eksistensi wajah disparitas, sebab pada saat itu pembangunan ekonomi mengalami penurunan. Jika menggunakan teori *inverted U-shaped curve* sebagaimana dikemukakan oleh Akita dan Lukman di atas, maka seharusnya krisis ekonomi dan moneter mempertinggi disparitas. Krisis ekonomi dan moneter menyebabkan pembangunan ekonomi melambat bahkan pertumbuhan ekonomi negatif. Pada saat itu, yang paling cepat terkena dampak krisis ekonomi dan moneter, serta pembangunan ekonomi yang melambat adalah masyarakat kelas ekonomi bawah sedangkan kelas ekonomi yang lebih tinggi lebih tidak terkena dampak krisis ekonomi dan moneter. Jadi krisis ekonomi dan moneter akan terlihat dengan jelas di tengah masyarakat dengan meningkatnya disparitas ekonomi dan moneter.

Oleh karena itu, dalam tulisan ini bermaksud untuk mengungkapkan eksistensi disparitas dengan mengambil *background* kondisi ekonomi pada saat krisis ekonomi dan moneter Indonesia sejak 1997 hingga 1999. Dipilih hanya tiga tahun, karena obyek penelitian adalah seluruh propinsi di Indonesia. Sebagaimana diketahui setelah tahun 1999, euforia otonomi daerah telah memunculkan beberapa propinsi baru pecahan dari propinsi lama. Menghindari kesalahan pengamatan, maka hanya dipilih tahun 1997 hingga tahun 1999. Selain itu, jelas sekali bahwa tahun 1997 hingga 1999 adalah beberapa tahun di antara seluruh tahun yang menunjukkan dengan sangat jelas bahwa krisis ekonomi dan moneter menghancurkan pembangunan ekonomi di Indonesia. Di dalam mengungkapkan eksistensi disparitas, akan digunakan variabel investasi, sebab sejak orde baru investasi telah digunakan sebagai variabel kunci dalam mempengaruhi sektor riil dan pembangunan ekonomi, baik melalui investasi pemerintah, investasi swasta dari dalam negeri sendiri ataupun investasi dari luar negeri. Adapun yang digunakan dalam

tulisan ini hanyalah investasi dalam negeri, PMDN dan investasi asing, PMA.

KERANGKA TEORI

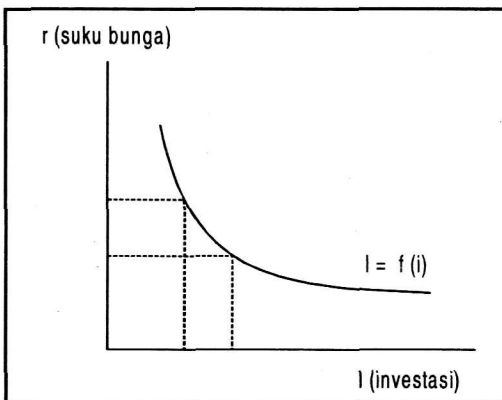
• Investasi

Pelaku ekonomi di masa sekarang, mengambil keputusan ekonomi berdasarkan rasionalitas parsial. Hal itu dapat diketahui dari perilaku ekonomi yang hanya mementingkan diri mereka sendiri. Bahkan mereka berpendapat bahwa rasional dan perilaku tersebut merupakan perilaku terbaik baik bagi dirinya dan masyarakat. Rasionalitas individu misalnya, telah dibatasi dalam bentuk *utility maximising*, sedangkan rasionalitas produsen adalah *cost minimising* dan *profit maximising*. Hal itu mereka anggap sebagai rasionalitas dan perilaku terbaik. Berkaitan dengan produsen, misalnya, JB Say mengemukakan "*supply creates its own demand*". Ungkapan itu menunjukkan bahwa produsen yang berperilaku '*supply*' berdasarkan *cost minimising* atau *profit maximising* berjasa besar karena telah menciptakan *demand* di tengah masyarakat melalui proses produksi.

Rasionalitas seorang investor juga berlandaskan rasionalitas ekonomi. Branson, (1989) mendiskripsikan rasionalitas dan perilaku investor sebagai konsep (*present discounted value of future*) *income from the investment*. Seorang investor akan mencermati *net returns* dengan cara membandingkan antara pendapatan yang bakal diperoleh dari sejumlah proyek investasi dengan biaya yang dikeluarkan. Jika disimpulkan bahwa *net returns* positif, maka investor melakukan pengeluaran investasi. Sebaliknya jika *net returns* negatif, maka investor tidak melakukan pengeluaran investasi. Dengan kata lain, semakin besar perkiraan *net returns* semakin besar pula pengeluaran investasi, sebaliknya semakin kecil *net returns* semakin kecil pula pengeluaran investasi. Dalam suatu perekonomian di mana berlandaskan sistem bunga pasar, *net returns* dapat dihitung melalui rumus *present discount value* (PDV) sebagai berikut:

$$PDV_t = -C + R_t + \frac{R_{t+1}}{(1+r)} + \frac{R_{t+2}}{(1+r)^2} + \dots + \frac{R_{t+n}}{(1+r)^n}$$

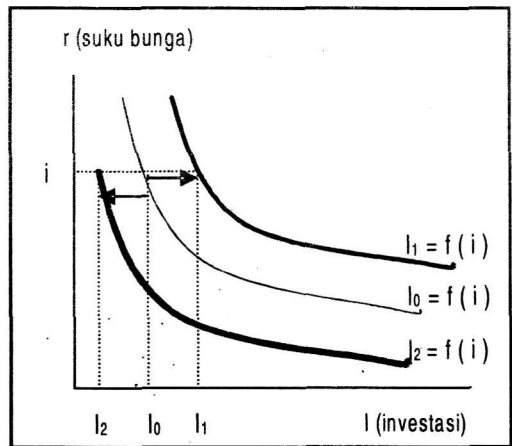
Dengan asumsi C (biaya) tetap, maka *net returns* dapat diperkirakan melalui jumlah R (penerimaan) yang bakal diperoleh hingga sejumlah tahun tertentu, t, dengan mendiskon-tokan terhadap tingkat suku bunga, r. Dalam perspektif seperti itu, untuk tahun yang sama, jika suku bunga r lebih tinggi, maka *net returns* lebih sedikit. Jika *net returns* lebih sedikit, maka investor cenderung mengurangi pengeluaran investasi. Demikian juga sebaliknya, jika suku bunga r lebih rendah, maka investor merasa bahwa *net returns* lebih besar. Jika membayangkan *net returns* yang bakal diterima lebih besar, maka investor bersedia mengeluarkan lebih banyak pengeluaran investasi. Oleh karena itu, dapat dibuat suatu hubungan negatif antara tingkat suku bunga dengan tingkat investasi. Perhatikan gambar berikut:



Gambar 1. Rasionalitas Parsial Perilaku Investasi

Investor merasakan *net returns* dari investasi lebih banyak atau lebih sedikit bukan hanya dari perubahan tingkat suku bunga, namun juga pada perubahan biaya (C). Jika suku bunga tetap, maka menurunnya biaya akan dirasakan sebagai kenaikan *net returns*, sebaliknya meningkatnya

biaya akan dirasakan sebagai berkurangnya *net returns*. Hal itu, jika digambarkan bahwa pada tingkat bunga yang sama, kenaikan biaya akan mengurangi pengeluaran investasi menjadi I_2 dari I_0 . Sedangkan berkurangnya biaya menaikkan investasi menjadi I_1 .



Gambar 2. Pengeluaran Investasi dan Biaya Investasi

Langhammer, (1988), mengamati bahwa peraturan investasi dari pemerintah menyebabkan perilaku investasi asing sekadar investasi sedangkan usahanya tersebut tetap dimiliki oleh penduduk lokal. Suatu pola yang menunjukkan bahwa FDI tersebut hampir sama dengan Indonesia melakukan impor. Di sisi lain Keuntungan besar diraih para investor asing yang memproduksi produk di luar negeri (Jepang, Amerika, dan lain-lain) kemudian terjual di Indonesia. Hal itu dapat disimpulkan dari FDI (*foreign direct investment*) dari Jepang ke Indonesia 50% berwujud (*capital equipment*) *in kind* dan dari hubungan negatif antara rasio *kind-cash financing* dengan rasio *loan-equity*. Adapun Linblad, 2000, mengemukakan bahwa salah satu alasan investasi di Indonesia oleh perusahaan Korea Selatan adalah mengurangi biaya produksi melalui penggunaan tenaga kerja tidak terlatih yang murah. Yeru Salimianto (2004), mengemukakan bahwa penurunan investasi yang terjadi akhir-akhir ini di Indonesia, termasuk di Jawa Tengah, walaupun PMDN Jawa Tengah ada sedikit pergerakan

meningkat, disebabkan investor memandang *country risk* tinggi. Yaitu berupa ketidakpastian politik, keamanan kurang, dan demikian juga pelayanan.

• Disparitas

Untuk mengetahui seberapa besar disparitas pembangunan ekonomi antarpropinsi, maka digunakan rumus koefisien variasi Williamson sebagai berikut:

$$VW = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2 \cdot \left(\frac{f_i}{n}\right)}}{\bar{Y}}$$

dimana:

- VW = Nilai koefisien disparitas Williamson.
 Y_i = PDRB per kapita masing-masing Propinsi di Indonesia (ribuan Rupiah).
 \bar{Y} = Rata-rata PDRB perkapita Indonesia.
 f_i = Jumlah penduduk tiap propinsi tahun I (jiwa).
 N = Jumlah seluruh penduduk Indonesia (jiwa).

Nilai koefisien variasi Williamson terletak antara 0 sampai 1, jika mendekati 1 maka berarti disparitas ekonomi antardaerah tinggi, dan sebaliknya apabila nilainya mendekati 0 menunjukkan tingkat disparitas rendah.

Akita dan Lukman, (1995), mengamati disparitas pendapatan antarpropinsi di Indonesia sejak 1975 hingga 1992 menggunakan indeks Williamson. Salah satu hasil pengamatannya adalah perbedaan nilai disparitas jika diukur melalui pengeluaran konsumsi dan jika diukur dengan GDP. Nilai disparitas jika diukur menggunakan pengeluaran konsumsi, lebih kecil dibandingkan jika menggunakan GDP. Hal itu secara implisit menunjukkan bahwa pembentukan modal tetap, atau investasi merupakan salah satu penyebab distribusi pendapatan yang tidak merata. Akita dan Lukman (1998) meneruskan pengamatan dengan memasukkan disparitas dalam propinsi.

Menggunakan *Theil inequality decomposition technique* mereka mendapatkan bahwa disparitas antarpropinsi disebabkan disparitas dalam pedesaan dan disparitas antara kota dan desa. Mereka juga menemukan bahwa disparitas dalam pedesaan dan disparitas antara kota dan desa disebabkan oleh urbanisasi. Sehingga secara implisit mereka menyimpulkan bahwa disparitas di Indonesia terkait dengan keberlanjutan pembangunan ekonomi.

Beberapa peneliti lain, menganggap disparitas adalah wajah buruk sosio-ekonomi di tengah masyarakat. Garcia dan Soelistianingsih, (1998), misalnya, menunjukkan bahwa propinsi yang miskin berusaha mengejar propinsi yang memiliki pendapatan menengah dan tinggi. Pada kenyataannya usaha tersebut gagal, dengan indikasi tidak ada perbedaan posisi disparitas antara tahun 1975 dengan 1993. Mencermati kejadian tersebut keduanya juga memperoleh kesimpulan bahwa disparitas berkurang jika dilakukan investasi sumber daya manusia di bidang kesehatan dan pendidikan. Adapun Booth (2000), menghubungkan antara pertumbuhan ekonomi, disparitas, dan kemiskinan. Pada tahun 1987 hingga 1996, pertumbuhan ekonomi kurang mampu untuk mengurangi kemiskinan disebabkan paralel dengan pertumbuhan ekonomi, terjadi peningkatan disparitas, khususnya di sektor perkotaan.

METODE PENELITIAN

Karena meneliti disparitas antarpropinsi di Indonesia sejak 1997 hingga 1999, maka alat analisa yang digunakan adalah regresi panel data. Adapun dari dua jenis regresi panel data, yaitu FEM (*fixed effect model*) dan REM (*random error model*) digunakan model FEM. Dalam menggunakan model FEM ini, terhadap hubungan antara disparitas (Y), dan PMA (X_1) dan PMDN (X_2) ditambahkan dua variabel *dummy in intercept*, yaitu untuk tahun 1998 adalah D_1 dan untuk 1999 adalah D_2 . Sehingga diperoleh persamaan regresi panel data sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_1 + \beta_2 X_{1it} + \beta_3 X_{2it} + \beta_4 D1_{it} + \beta_5 D2_{it} + u_{it}$$

Adapun data yang diperlukan adalah data-data di 27 Propinsi di Indonesia sejak 1997 hingga 1999. Data tersebut diperoleh dari BPS (Biro Pusat Statistik) dan meliputi:

1. Data produk domestik regional bruto (PDRB)
2. Data jumlah penduduk
3. Data PMDN (penanaman modal dalam negeri) yang disetujui pemerintah
4. Data PMA (penanaman modal asing) yang disetujui pemerintah

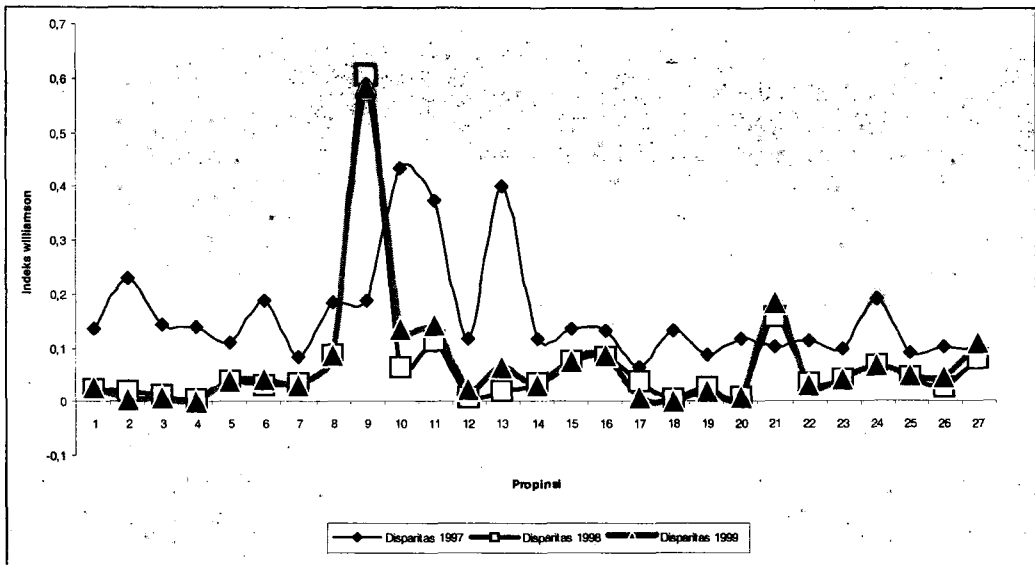
HASIL PENELITIAN

Menggunakan Indeks Williamson, dapat diketahui disparitas antarpropinsi di Indonesia sejak 1997 hingga 1999, seperti terlihat pada Tabel 1. Disparitas antarpropinsi di Indonesia sejak 1997 hingga 1999 cukup rendah. Rata-rata disparitas pada tahun 1997 hanya 0,16, sedangkan pada tahun 1998 dan 1999 mengalami penurunan menjadi 0,066 dan 0,072. Disebut cukup rendah karena nilai Indeks Williamson memiliki nilai antara 0 hingga 1, dimana semakin rendah nilai indeks menunjukkan disparitas yang rendah. Adapun krisis ekonomi justru menyebabkan disparitas antarpropinsi di Indonesia berkurang. Gambar 3 di bawah menunjukkan dengan jelas penurunan disparitas tersebut. Gambar 3 juga menunjukkan bahwa perkecualian pada tahun 1999 terjadi di DKI Jakarta (no. 9) yang mengalami disparitas melonjak sangat tinggi dan Kalimantan Timur (no. 21) yang mengalami disparitas cukup tinggi.

Tabel 1. Disparitas AntarPropinsi Sejak 1997 hingga 1999

No.	Disparitas 1997	No.	Disparitas 1998	No.	Disparitas 1999
1.	0.1371150	1.	0.2318600	1.	0.2780449
2.	0.2290380	2.	0.2119900	2.	0.5133149
3.	0.1436860	3.	0.1238500	3.	0.7861853
4.	0.1386940	4.	0.5988000	4.	0.9006050
5.	0.1096570	5.	0.3780600	5.	0.3974601
6.	0.1882990	6.	0.3251000	6.	0.416466
7.	0.8484110	7.	0.3334600	7.	0.3241925
8.	0.1842020	8.	0.8645800	8.	0.8567164
9.	0.1870610	9.	0.6068750	9.	0.5837928
10.	0.4339220	10.	0.6389900	10.	0.1366758
11.	0.3766130	11.	0.1138040	11.	0.1441596
12.	0.1162310	12.	0.1004900	12.	0.2194620
13.	0.3991150	13.	0.1908300	13.	0.6501424
14.	0.1158660	14.	0.3464200	14.	0.2954214
15.	0.1344500	15.	0.7434200	15.	0.7530077
16.	0.1344500	16.	0.8264500	16.	0.8536796
17.	0.6485100	17.	0.3801800	17.	0.7201186
18.	0.1327490	18.	0.5785000	18.	0.8586340
19.	0.8849100	19.	0.2668500	19.	0.2048460
20.	0.1177530	20.	0.7849000	20.	0.8321960
21.	0.1021460	21.	0.1577540	21.	0.1841500
22.	0.1132420	22.	0.3444800	22.	0.3174919
23.	0.9888100	23.	0.4155200	23.	0.4244763
24.	0.1922600	24.	0.6831900	24.	0.6975712
25.	0.9004400	25.	0.4539600	25.	0.4920122
26.	0.1015440	26.	0.2728600	26.	0.4439968
27.	0.9454300	27.	0.8093500	27.	0.1101926

Penyumbang terbesar disparitas di Indonesia, sebagaimana terlihat pada Tabel 2. adalah propinsi-propinsi di Pulau Jawa, yaitu sebesar 0,21855. Pulau-pulau lain memiliki ketimpangan lebih rendah, yaitu 0,07, kecuali P. Sumatera yang lebih tinggi sedikit, yaitu 0,08.



Gambar 3. Disparitas Antarpropinsi 1997-1999

Tabel 2. Disparitas Antarpulau

Pulau	Disparitas 1997	Disparitas 1998	Disparitas 1999	Rata-rata 3 Tahun
Sumatra	0.17365	0.03613	0.03445	0.08141
Jawa	0.30259	0.16274	0.19031	0.21855
Bali, Nusa Tenggara, dan Timtim	0.11219	0.05741	0.04935	0.07299
Kalimantan	0.11028	0.04952	0.05345	0.07109
Sulawesi	0.12361	0.04743	0.04828	0.07311
Maluku dan Irian	0.09804	0.05411	0.0773	0.07648

Tabel 3 menyajikan urutan dari yang paling tinggi propinsi di Pulau Jawa yang memiliki kontribusi terhadap disparitas dilihat dari rata-rata selama 3 tahun. Yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DI Yogyakarta. Propinsi Jawa Barat memiliki disparitas paling tinggi tahun 1997. Adapun DKI Jakarta menyumbang disparitas paling tinggi pada tahun 1998 dan 1999. Perhatikan pula pergerakan disparitas dari waktu ke waktu DKI berbeda dengan disparitas propinsi lain.

Hasil estimasi regresi panel data antara

disparitas dengan penanaman modal dalam negeri (PMDN), penanaman modal asing (PMA) dan variabel *dummy* 1998 dan 1999 sebagai berikut:

$$Y_{it} = 0,124 + 9,734E-06X_{1it} + 5,338E-06X_{2it} -$$

(5,645) (1,054) (1,764)

$$7,46E-02D1_{it} - 6,59E-02D2_{it} + u_{it}$$

(-2,663) (-2,339)

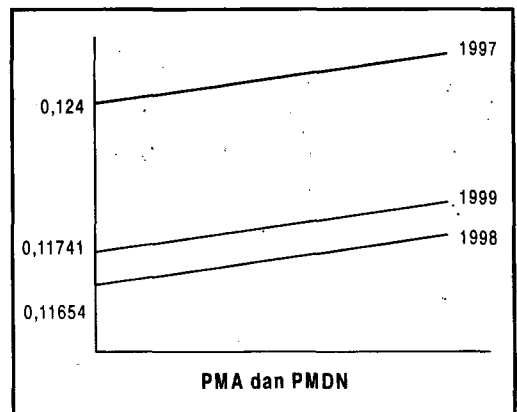
$$DW = 2,010 \quad R^2 = 0,263 \quad F = 6,777$$

Hasil regresi tersebut dilihat dari nilai VIF, nilai DW, dan uji heteroskedastisitas menggunakan korelasi rank Spearman, tidak menunjukkan adanya penyimpangan dari asumsi klasik. Sehingga dapat dipastikan bahwa X_1 , PMDN tidak mempengaruhi disparitas, sebab memiliki nilai t hitung yang sangat rendah. Adapun X_2 , jika menggunakan $\alpha = 10\%$ signifikan mempengaruhi disparitas. Demikian juga D_1 dan D_2 , disparitas tahun 1998 dan 1999 mempengaruhi disparitas. Kelemahan dari model tersebut karena memiliki koefisien determinasi yang rendah. Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,263 yang berarti bahwa 26,3% variasi pengaruh disparitas dapat diterangkan oleh variasi dari penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing, ketimpangan tahun 1998 dan tahun 1999. Sementara sisanya sekitar 73,7 dijelaskan faktor lain di luar variabel yang digunakan.

Penanaman modal asing ternyata mempengaruhi disparitas di Indonesia secara positif. Semakin tinggi penanaman modal asing semakin tinggi disparitas, sebaliknya semakin turun penanaman modal asing semakin turun disparitas. Hal itu karena PMA adalah salah satu jenis investasi. Semua investasi, termasuk melalui PMA selalu berlandaskan pada perhitungan antara *marginal efficiency of investment* dengan *cost of investment*. *Cost of investment* di luar Pulau Jawa, karena kurang tersedianya infrastruktur dan lain-lain hal, lebih tinggi daripada di Pulau Jawa. Hal itu menyebabkan para pelaku PMA lebih suka untuk melakukan investasi di Pulau Jawa, khususnya DKI. Akibatnya disparitas Pulau Jawa dan khususnya DKI menjadi lebih tinggi daripada pulau dan propinsi lainnya.

Kejadian tersebut tidak hanya terjadi pada tahun 1997, namun juga pada tahun 1998 dan 1999. Hal itu dapat diketahui dari signifikansi ketimpangan 1998 dan ketimpangan 1999. Karena model *dummy* yang digunakan adalah perbedaan intersep dan bukan perbedaan *slope* (dan intersep), dapat diketahui pula dari koefisien *dummy* yang bertanda negatif bahwa

krisis justru menyebabkan ketimpangan berkurang. Dengan slope tetap, intersep tahun 1998 adalah intersep keseluruhan (konstanta) ditambah dengan koefisien *dummy* 1998. Karena koefisien *dummy* 1998 negatif, maka intersep 1998 lebih rendah dari intersep keseluruhan, yaitu $0,124 + (-0,00746)$, atau 0,11654. Hal yang sama terjadi pada *dummy* 1999, yaitu $0,124 + (-0,00569)$ atau 0,11741. Jika digambarkan dalam bentuk grafik sederhana nampak sebagai berikut:



Gambar 4. Regresi 1997, 1998, dan 1999

Pada grafik tersebut menunjukkan bahwa disparitas tahun 1998 dan tahun 1999 lebih rendah dari dari 1997. Walaupun 1999 lebih tinggi dari 1998. Krisis ekonomi menyebabkan ketimpangan berkurang, namun usaha-usaha untuk menanggulangi krisis justru menyebabkan disparitas meningkat kembali, walaupun hanya sedikit, sebagaimana terlihat pada tahun 1999. Yang jelas pada ketiga tahun menunjukkan signifikansi pengaruh penanaman modal asing terhadap disparitas.

KESIMPULAN DAN SARAN

Menggunakan model panel data dapat diketahui bahwa disparitas antarpropinsi di Indonesia sejak 1997 hingga 1999 disebabkan oleh penanaman modal asing. Adapun penanaman modal dalam negeri tidak signifikan mempengaruhi. Disparitas antarpropinsi di

Indonesia tidak terlalu besar. Namun demikian tetap harus menjadi perhatian. Pulau Jawa dan khususnya DKI memberi kontribusi sangat besar terhadap disparitas antarpropinsi. Adapun krisis ekonomi dan moneter justru menyebabkan disparitas menjadi lebih kecil. Kelemahan model panel data ini terdapat pada nilai koefisien determinasi (R^2) yang rendah yaitu 26,3%. Selain itu kelemahan terdapat pada asumsi bahwa *slope* persamaan variabel *dummy* konstan. Oleh karena itu diberikan beberapa saran seperti berikut ini;

- a. Mengingat kelemahan model terdapat pada nilai koefisien determinasi yang rendah, maka peneliti yang tertarik memperdalam pengamatan terhadap disparitas supaya menambah variabel yang lain, selain PMA dan PMDN.
- b. Berkaitan model panel data yang didekati dengan *dummy variable*, dapat ditambahkan variabel yang menunjukkan variabilitas *slope*. Dapat juga digunakan model panel data yang berlandaskan *random error model*.
- c. Pemerintah harus selektif terhadap PMA yang masuk, apakah menyebabkan disparitas atau tidak.
- d. Pemerintah harus memberikan insentif yang lebih besar kepada PMDN, sebab PMDN tidak signifikan menyebabkan disparitas.
- e. Pemerintah harus memperbaiki infrastruktur dan hal-hal lainnya di berbagai propinsi dan pulau, sama seperti di DKI dan Pulau Jawa sehingga biaya investasi di berbagai daerah sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Akita, Takahiro, dan Rizal Affandi Lukman (1995), 'Interregional Inequalities in Indonesia: A Sectoral Decomposition Analysis for 1975-92', *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 31 (2):61-82.
- _____. "Spatial Patterns of Expenditure Inequalities in Indonesia 1987, 1990 AND 1993". *Bulletin of Indonesian Economic Studies* Vol 35 No 2, August 1999, pp.67-90
- Booth, Anne. "Poverty and Inequality in The Soeharto Era: an Assessment". *Bulletin of Indonesian Economic Studies* Vol 36 No 1, April 2000, pp.73-104
- Branson, William H. 1998. *Macroeconomic Theory and Policy*. New York: Harper & Row, Publisher.
- Garcia, Jorge Garcia dan Lana Soelistianingsih. "Why do differences in Provincial Incomes Persist in Indonesia". *Bulletin of Indonesian Economic Studies* Vol 34 No 1, April 1998, pp 95-120.
- Langhammer, Rolf J. 1988. "Financing of Foreign Direct Investment and Trade Flows: The Case of Indonesia". *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol 24 No 1, April 1988.
- Linblad, J. Thomas. "Korean Investment in Indonesia : Survey and Appraisal". *Bulletin of Indonesian Economic Studies* Vol 36 No 1, April 2000, pp.167-184.
- Yeru Salimianto. 2004. *Peran Investasi Dalam pembangunan Daerah di Propinsi Jawa Tengah* (Dalam Bunga Rampai ekonomika Pembangunan, Penyunting: Agung Riyardi dan T. Sihol Nababan, Program Doktor Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, 2004)